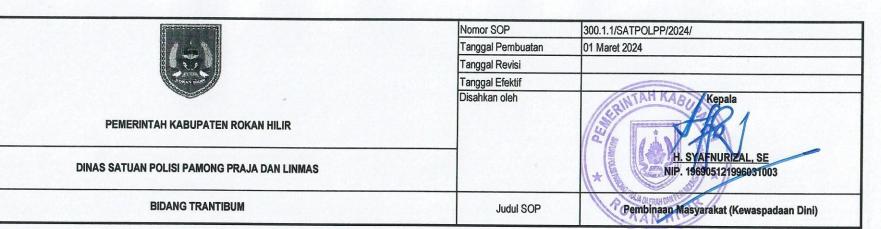


PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMBINAAN MASYARAKAT (KEWASPADAAN DINI)



Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik	Mempunyai kewenangan dalam menyusun program rencana kegiatan pengumpulan dan pengolahan data Kewaspadaan dini				
 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205); 	2. Memiliki kemampuan pengumpulan dan pengolahan data Kewaspadaan dini				
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat 	3. Memiliki kemampuan Mengkonsep surat				
 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja 					
 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tantang pembentukan perangkat daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11) 					
 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 25 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (SOP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir 					
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
Melakukan Koordinasi dan Kerjasama antar Instansi Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD SK Kepala Satuan POL PP dan Linmas Peralatan Komputer				
eringatan	Pencatatan dan pendataan				
Agar dilaksanakan sesuai SOP agar memperoleh data kewaspadaan dini di Kabupaten Rokan Hilir dapat terdata	Sasaran Strategi, Indikator Kinerja, target, program dan anggaran satu				

Prosedur Pembinaan Masyarakat (Kewaspadaan Dini)

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan	
		eya giillis ea	KASI	KABID	KEPALA	Kelengkapan	Waktu	Output	(vereiangan
1	Membuat Draf SK TIM Pembinaan Masyarakat Pengendalian Kewaspadaan Dini, kemudian mengajukan ke Kepala Bidang TRANTIBUM untuk di Paraf, selanjutnya diajkuan ke Kepala SATPOL PP untuk ditandatangai		2			ATK, Komputer	1 Hari	Draf SK	
2	Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK)		V			ATK, Komputer	1 Hari	КАК	
3	Membuat Surat Permintaan data Identifikasi potensi kerawanan sosial untuk melakukan Koordinasi					ATK, Komputer	1 Hari	Surat Permintaan	
4	Menyiapkan Administrasi Rapat (Undangan, Materi, Tempat dan Waktu Kegiatan dan Daftar Hadir)	-				ATK, Komputer	2 Hari	Undangan dan Materi	
5	Registrasi, penyampaian materit, tanya jawab					ATK, Komputer, Tempat Acara	1 Hari	Dokumentasi Acara	
6	Membuat laporan pelaksanaan kegiatan ke pimpinan		> (ATK, Komputer	1 Hari	Laporan Kegiatan	